

Tema Penelitian : Pengembangan iptek bagi desa mitra dan desa binaan

**Laporan Penelitian Kelembagaan
Jurusan/Prodi:Ekonomi Pembangunan**

Judul Penelitian :

**PENENTUAN POTENSI EKONOMI DESA UNTUK PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN MB-KM MEMBANGUN DESA/KKN TEMATIK PADA
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI
FEB UPN “VETERAN” YOGYAKARTA**



Penanggung jawab :

**Nama : Dr. Jamzani Sodik, M.Si
NIDN : 0517027101
ID SINTA : 6035343
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
2021**

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR

1. a. Judul Penelitian : Penentuan Potensi Ekonomi Desa Untuk Pelaksanaan Pembelajaran MB-KM Membangun Desa/KKN Tematik pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi FEB UPN "Veteran" Yogyakarta
- b. Cakupan Bidang Ilmu : Ilmu Sosial, Ekonomi Pembangunan
- c. Fokus riset : Kegiatan Ekonomi Pedesaan
2. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Dr. Jamzani Sodik, S.E, M.Si
 - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - d. Fakultas/Prodi : Ekonomi/Ilmu Ekonomi
3. Jumlah Tim Peneliti : 3 orang
 1. Dr. I Ketut Nama, M.Si
 2. Dr.E. Diah Lufti Wijayanti, M.Si
4. Lokasi Penelitian : Kabupaten Bantul
5. Lama Penelitian : 8 Bulan
6. Biaya yang diperlukan
 - a. Sumber UPN : Rp. 50.000.000,00
 - b. Sumber lain (sebutkan) : -Jumlah : Rp. 50.000.000,00



Yogyakarta, 29 Oktober 2021
Ketua Peneliti

(Dr. Jamzani Sodik, S.E, M.Si)
NIK. 2 7102 96 0073 1



ABSTRACT

The background of this research is the preparation of the Independent Learning Curriculum for the Independent Campus (MBKM) of the Development Economics Study Program. One of the mandates of the curriculum is the flexibility of the student learning process to get an off-campus learning experience for one semester (6 months), including through village building activities/thematic Real Work Lectures (KKN thematic) which are equated with the achievement of 21 credits. The purpose of this research is the availability of a thematic Village Development Activity Implementation Guide/KKN as a complement to the curriculum that has been prepared. This guide provides directions, and detailed instructions for managers of study programs and their staff, students of the development economics study program (S1) who choose learning through village building activities/thematic KKN.

The problem of this research is: what are the village economic activities that can be used as objects of activities to build the thematic village / KKN. The method used to answer these problems is: (1) Survey at the location of Wirokerten Village (2) Focus Group Discussion (FGD) with stakeholders (village officials, villagers, and lecturers of the Department of Economics).

The results showed that village programs related to village economic development programs were sub-programs related to: the field of small and medium enterprises (MSMEs), and the fields of trade and industry, which was the choice for student development study programs in the implementation of the MBKM program to build Thematic Village / KKN

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Yang Maha Murah, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya-Nya kepada kita semua sehingga laporan penelitian kelembagaan dengan judul : **Penentuan Potensi Ekonomi Desa Untuk Pelaksanaan Pembelajaran Mb-Km Membangun Desa/Kkn Tematik Pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi FEB UPN “Veteran” Yogyakarta** ini tersusun sesuai rencana. Seperti diketahui Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan keniscayaan apabila Indonesia ingin menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang kompetitif. MBKM dimaksudkan untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi para mahasiswa mempelajari ilmu pengetahuan dan keahlian lintas institusi, dan menggunakan cara-cara yang lebih mendukung teraktualisasikannya potensi para mahasiswa diharapkan akan mampu menciptakan lulusan yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang relevan dengan kebutuhan Abad 21 saat ini.

Keberhasilan pelaksanaan MBKM tentu sangat tergantung dari dukungan seluruh stakeholder terkait: dosen, mahasiswa, dan para mitra. Penelitian ini sangat bermanfaat di dalam menyamakan pemahaman seluruh stakeholders terkait dengan MBKM. Dengan kesamaan persepsi diharapkan implementasi MBKM akan berjalan sukses seperti yang diharapkan. Dengan selesainya penelitian ini maka program pembelajaran di luar kampus MBKM bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan

Dengan penuh rasa hormat kami mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang selalu mengingatkan pentingnya penelitian ini. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Bapak/Ibu dosen yang membantu tersusunnya laporan penelitian ini, terutama :

- 1) LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta yang mendukung pendanaan yang salah satu luarannya adalah buku panduan ini
- 2) Tim Penyusun Bpk. Dr. Jamzani Sodik, SE, M.Si, Drs. Purwiyanta, M.Si dan Kawan-kawan yang dengan tekun menyusun, menelaah dan memberikan koreksi terhadap laporan ini.
- 3) Kepada seluruh dosen dan karyawan Jurusan Ilmu Ekonomi yang membantu dan terlibat dalam laporan penelitian ini.

Kami menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna, oleh karenanya kritik, saran, dan masukan sangat kami harapkan guna kesempurnaannya. Semoga penelitian ini dapat menjadikan langkah awal yang bermanfaat dan memberikan pedoman dalam pelaksanaan MBKN, khususnya pelaksanaan Kegiatan Proyek Di Desa pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi yang kita cintai ini. Seperti kata orang bijak : “PERJALANAN SERIBU MIL SELALU DIMULAI DENGAN LANGKAH PERTAMA”.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 September 2021

Dr. Jamzani Sodik, M.Si
Ketua Jurusan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Penelitian	2
1.4. Manfaat Penelitian	2
1.5. Luaran Penelitian	3
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	4
BAB III. METODE PENELITIAN	8
3.1. Ruang Lingkup Penelitian	8
3.2. Jenis dan Sumber Data	8
3.2. Jadwal Pelaksanaan Penelitian	11
BAB IV. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN	12
BAB V. STATUS LUARAN	14
5.1. Luaran Wajib	14
5.2. Luaran Tambahan	14
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	15
6.1. Kesimpulan	15
6.2. Saran	15
Daftar Pustaka	16
Lampiran	18
I. Draf Artikel Ilmiah	18
II. Draft MOU	34

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Rincian Kegiatan	10
Tabel 3.2. Jadwal Kegiatan Penelitian	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Road Map Peran Serta PT	7
Gambar 3.1. Bagan Alur Kegiatan Penelitian	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang selanjutnya disingkat MBKM, dilandasi oleh Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, khususnya pasal 15 s/d 18. MBKM bertujuan untuk mendorong mahasiswa memperoleh pengalaman belajar dengan berbagai kompetensi tambahan di luar program studi dan/atau di luar kampusnya (Junaidi, Aris, 2020). Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan manusia yang berdaya saing; yaitu manusia yang sehat, cerdas, adaptif, kreatif, inovatif, terampil, bermartabat, produktif, dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Instrumen penting untuk implementasinya adalah dengan menerapkan delapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020. Terkait dengan hal ini Rektor telah memberikan petunjuk pelaksanaan MBKM melalui Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

Program studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi pada tahun 2020 mendapatkan hibah MBKM dari kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Penerapan Kurikulum MBKM dalam rangka meningkatkan kompetensi lulusan. Luaran dari hibah tersebut adalah fleksibilitas proses belajar mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di luar kampus selama satu semester (6 bulan dan setara dengan 21 SKS), yang tertuang pada kurikulum 2020, dan berlaku bagi mahasiswa angkatan 2019 dan sesudahnya. Berkaitan dengan itu, telah dirancang empat bentuk kegiatan pembelajaran di luar kampus, yaitu ; (1) Magang/Praktik Kerja; (2) Membangun Desa/KKN Tematik; (3) Penelitian/Riset; (4) Wirausaha

Khusus kegiatan membangun desa/ KKN tematik ditujukan untuk pencapaian salah satu *learning outcomes* program studi yaitu, “*lulusan program studi ekonomi pembangunan mampu menggunakan konsep dasar teori ekonomi yang dikuasai untuk memecahkan masalah ekonomi dan pembangunan*”. Hal ini sejalan dengan harapan Kemendikbud bahwa program studi mampu menyiapkan mahasiswa menjadi lulusan perguruan tinggi yang merupakan pembelajar sejati yang kompeten, lentur dan ulet (*agile learner*), siap berkontribusi positif dalam pembangunan bangsa dan menjadi warga dunia yang produktif.

Keterlibatan mahasiswa pada aktivitas membangun desa/KKN tematik sejalan pula dengan eksistensi UPN “Veteran” Yogyakarta sebagai universitas bela negara. Pengalaman pembelajaran membangun desa diharapkan menumbuhkan empati mahasiswa terhadap permasalahan pembangunan ekonomi pedesaan dan tumbuh semangat bela negara. Oleh karenanya Jurusan/Program studi perlu melakukan kajian terhadap masalah-masalah pembangunan ekonomi pedesaan sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan kegiatan membangun desa/KKN tematik.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diajukan pada penelitian ini adalah :

- 1) Apa saja kegiatan ekonomi desa yang dapat dipergunakan sebagai obyek kegiatan Membangun Desa/KKN tematik?
- 2) Bagaimana skema kerjasama yang efektif untuk kegiatan ini?
- 3) Petunjuk teknis apa saja yang diperlukan mahasiswa untuk kegiatan ini?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah; (1) Mengkaji permasalahan-permasalahan pembangunan ekonomi pedesaan yang bisa dijadikan sebagai obyek kegiatan pembelajaran di luar kampus; (2) Mengkaji dan menyusun skema kerja sama yang dimungkinkan untuk kegiatan tersebut; (3) Mengkaji dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan dari kegiatan tersebut.

Urgensi dari Penelitian ini adalah tersedianya Panduan Pelaksanaan Kegiatan Membangun Desa/KKN Tematik sebagai pelengkap kurikulum yang sudah disusun. Panduan ini memberikan arah, dan petunjuk terperinci bagi pengelola program studi beserta jajarannya, dan mahasiswa yang memilih kegiatan pembelajaran melalui kegiatan membangun desa/KKN tematik.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman kepada para mahasiswa, dosen dan stakeholder yang terkait dengan pembelajaran di luar kampus MB-KM yaitu program kegiatan Membangun Desa/KKN tematik.

1.5. Luaran Penelitian

Parameter kegiatan ini adalah: (1) Tersusunnya Buku Pelaksanaan Kegiatan Membangun Desa pada Kurikulum MBKN Program Studi Ekonomi Pembangunan. (2) *Memorandum of Activity* (MOA) antara FEB dengan Desa (sekaligus sebagai desa binaan) untuk kegiatan membangun desa/KKN tematik (3) kesiapan Jurusan/Program Studi untuk melaksanakan salah satu pembelajaran di luar kampus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Paradigma pembangunan pedesaan telah mengalami perubahan yang berarti. Menurut Rivera, et al, (2017) paradikma lama pembangunan pedesaan sangat sederhana dan berhubungan erat dengan masalah modernisasi sektor pertanian dan mengambil manfaat langsung yang dihasilkan dari modernisasi sektor pertanian tersebut. Pada akhirnya disadari bahwa penyelesaian pembangunan pedesaan membutuhkan pendekatan dari berbagai aspek. Pouw dan Gupta (2017) menyebutkan bahwa pembangunan haruslah inklusif, tidak hanya satu pendekatan akan tetapi menggunakan banyak pendekatan. Pembangunan inklusif menekankan pada pembangunan dengan pendekatan banyak aspek ekonomi dan aspek sosial seperti keterlibatan masyarakat dan masalah politik.

Todaro dan Smith (2012) mengemukakan pentingnya peranan perencanaan pembangunan sebagai *surest and direct route to economic growth*. Pada masa lalu dan juga dilaksanakan pada beberapa negara, perencanaan pembangunan dilaksanakan secara *top down*, dalam hal ini peranan pemerintah pusat dalam perencanaan pembangunan sangatlah dominan. Pemerintah pusat mempersiapkan program pembangunan ekonomi nasional, atau *roadmap* yang sesuai dengan kondisi nasional. Memang dengan sistem ini pembangunan ekonomi lebih terarah dan terkendali, akan tetapi banyak kebijakan kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat daerah.

Melalui kebijakan Otonomi Daerah, Indonesia mencoba untuk menerapkan perencanaan pembangunan yang bersifat *bottom up*, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah. Melalui otonomi diharapkan aspirasi masyarakat daerah dapat teraseraap oleh pemerintah pusat dan pelaksanaannya sejalan dengan potensi sumberdaya yang dimiliki daerah tersebut, karena masyarakat di daerah sangat paham dengan segala potensi yang dimilikinya (Kim et al. 2014).

Sebenarnya tidak hanya paradigma pembangunan yang mengalami perubahan, dari *top down* menjadi *bottom up*, akan tetapi pembangunan saat ini juga telah memberikan penekanan keterlibatan masyarakat dan memasukkan aspek pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari proses pembangunan, sering disebut sebagai *people centered development*, pembangunan berbasis

sumberdaya local (*resources based development*), serta pembangunan dengan memasukan aspek kelembagaan (Suswanto, et al. 2013).

Dalam hal pembangunan pedesaan, pemerintah desa merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat yang dapat memiliki peran strategis dalam melaksanakan manajemen pembangunan sehingga tercapainya percepatan keberhasilan pembangunan nasional (Rafsanzani, et al. 2010). Syahza dan Suarman (2013), menyatakan bahwa pembangunan pedesaan harus dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan sifat, karakter dan cirinya.

Kondisi sosial budaya, dan sosial ekonomi perlu dikenali dalam menentukan prioritas pembangunan pedesaan dan dituangkan pada perencanaan yang terpadu. Beberapa kondisi sosial budaya diantaranya adalah; (1) nilai-nilai yang dianut masyarakat secara dominan yang mampu menjadi penggerak masyarakat; (2) kekuatan-kekuatan sosial seperti apa yang mampu mendorong perubahan sehingga masyarakat dapat berubah dari dalam dirinya; (3) karakter masyarakat dalam mensikapi intervensi sosial; (4) pola informasi dan komunikasi yang terjadi di tengah masyarakat baik menyangkut penyebaran informasi maupun dalam kerangka pembelajaran; (5) media pembelajaran masyarakat; dan (6) faktor lingkungan apakah yang berpengaruh terhadap sikap dan perilaku masyarakat (Muerad et al. 2016).

Pengembangan basis ekonomi pedesaan sudah lama dijalankan melalui berbagai program, akan tetapi upaya ini belum sepenuhnya berhasil. Salah satu faktor yang paling disoroti adalah besarnya intervensi pemerintah yang kadang-kadang menghambat kreatifitas dan inovasi masyarakat. Hal lain yang barang kali perlu diperhatikan juga adalah sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan belum berjalan efektif dan cenderung tergantung bantuan pemerintah, dan tingkat kemandirian yang masih rendah.

Untuk mempercepat pembangunan ekonomi pedesaan pemerintah Indonesia melalui Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan kewenangan desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui. Hal ini merupakan langkah awal kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan dana desa. Disamping diberikan kewenangan, mulai tahun 2015 pemerintah desa diberikan alokasi dana yang bersumber dari APBN. Melalui alokasi dana desa diharapkan desa dapat berperan lebih aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.

Perguruan tinggi dapat mengambil peran serta dalam pembangunan masyarakat desa sebagaimana tertuang dalam gagasan *Triple Helix*, yang tidak lain adalah sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, maupun dunia bisnis. Dalam hal ini perguruan tinggi menyumbangkan sumberdaya yang dimilikinya yakni ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh para akademisinya.

Dalam Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (Dirjendikti, 2020) disebutkan bahwa untuk meningkatkan *link and match* antara lulusan pendidikan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri serta masa depan yang semakin cepat mengalami perubahan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberlakukan kebijakan baru di bidang pendidikan tinggi melalui program “Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM)”. Kebijakan MBKM memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan kompetensi baru melalui beberapa kegiatan pembelajaran di luar program studinya, dengan harapan kelak pada gilirannya dapat menghasilkan lulusan yang siap untuk memenangkan tantangan kehidupan yang semakin kompleks di abad ke 21 ini.

Secara sederhana gambaran peta jalan (*road map*) dalam penelitian ini didasarkan pada perubahan paradigma pembangunan pedesaan dan peran serta perguruan tinggi melalui program MBKM. Sinergi antara pemerintah desa dan perguruan tinggi, diantaranya dapat terwujud melalui pelibatan mahasiswa dalam kegiatan membangun desa/KKN tematik. *Output* dari kegiatan ini adalah percepatan pembangunan masyarakat pedesaan, dan mahasiswa mendapatkan pengalaman dan pembelajaran melalui keterlibatannya pada pembangunan desa. Bagan 1, menjelaskan peta jalan (*road map*) kegiatan tersebut.



Bagan 1 :
Road Map Peran serta Perguruan tinggi dalam Pembangunan Masyarakat Pedesaan.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini hanya terbatas pada Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Desa ini dipilih dengan pertimbangan bahwa Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi telah melakukan penjajakan awal dalam rangka mendapatkan hibah kurikulum MBKM tahun 2020. Alasan lainnya adalah bahwa UPN “Veteran” Yogyakarta telah mempunyai MOU dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan pada penelitian ini.

Untuk keperluan analisis diperlukan data primer maupun data sekunder. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data-data yang berhubungan dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat desa, data tersebut adalah :

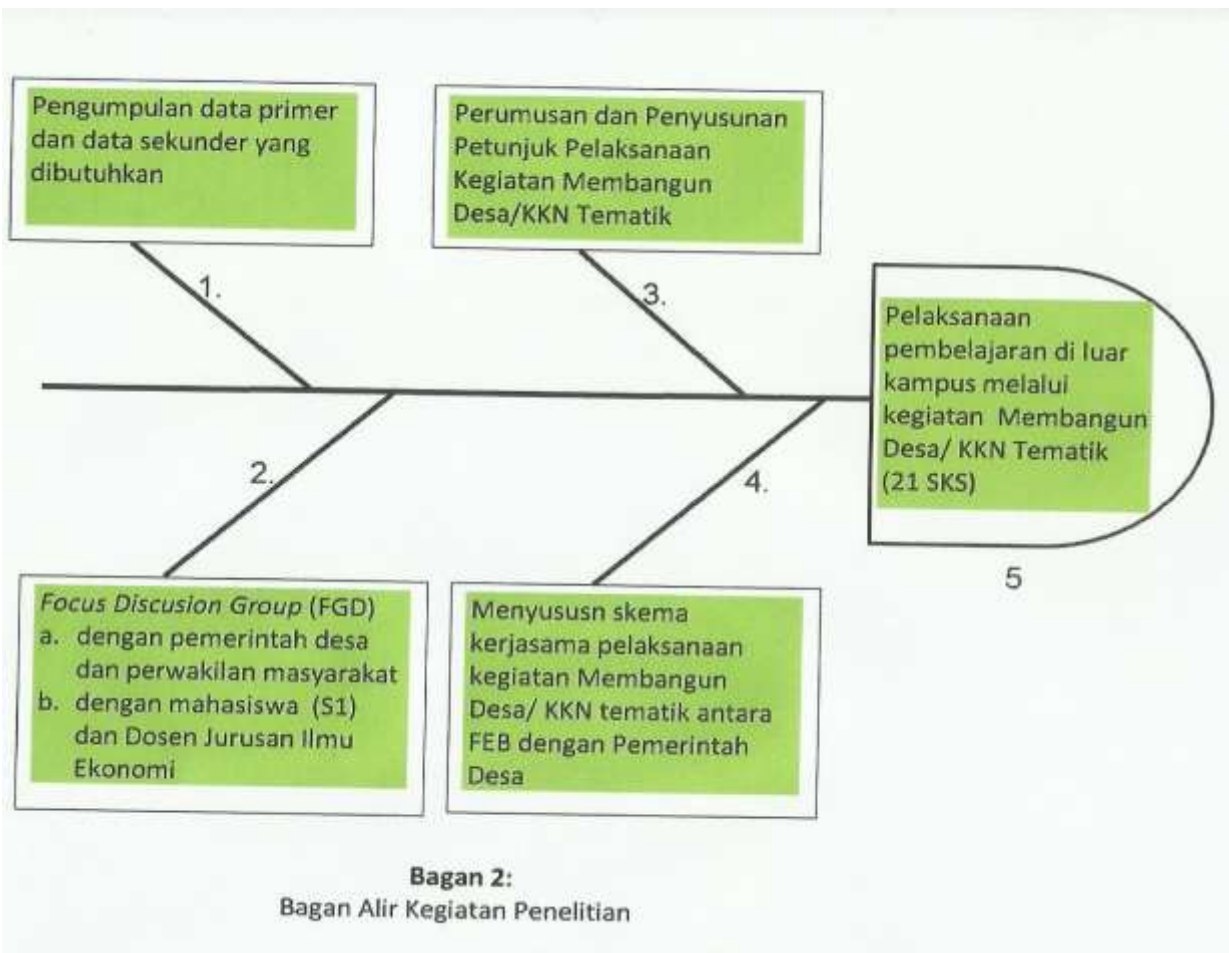
1. Semuan kegiatan ekonomi yang ada di wilayah desa
2. Lembaga pendukung kegiatan ekonomi dan sosial
3. Potensi sumberdaya alam
4. Kondisi sosial masyarakat
5. Organ pemerintah desa

Data primer diperoleh dengan *survey* di lokasi maupun wawancara langsung dengan *stakeholders*, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumentasi pemerintah desa, bps kabupaten, maupun kepustakaan lain yang mendukung. Pemilihan kegiatan ekonomi desa yang dipergunakan sebagai obyek kegiatan membangun desa/KKN tematik dilakukan melalui *focus group discussion (FGD)* dengan para *stakeholder*. Secara ringkas langkah-langkah yang dilakukan pada penelitian ini adalah:

1. Melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan
2. Melakukan analisis kegiatan ekonomi yang bias dikembangkan melalui :
 - a. *Focus group discussion (FGD)* dengan pemerintah desa dan perwakilan masyarakat.

- b. *Focus group discussion (FGD)* dengan dosen dan mahasiswa sarjana (S1) Jurusan Ilmu Ekonomi.
3. Merumuskan rancangan dan menyusun Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Membangun Desa/KKN Tematik (21 SKS)
4. Menyusun skema kerjasama pelaksanaan membangun desa/KKN tematik antara FEB dengan pemerintah desa.
5. Pelaksanaan Kegiatan membangun desa/ KKN tematik

Bagan alir sistematika kegiatan disusun dalam bentuk diagram tulang ikan (*fishbone diagram*), seperti tercermin pada Bagan 2. Adapun rincian kegiatan yang sudah disusun pada bagan secara utuh pada masing-masing tahapan, *person in charge* (PIC), luaran, dan indikator capaian luaran yang ditargetkan untuk masing-masing tahapan kegiatan dijelaskan seperti pada Tabel 1.



Tabel 3.1:
Rincian Kegiatan, Person In Charge (PIC), Luaran, dan Indikator Capaian Luaran yang Ditargetkan

No	Kegiatan	PIC	Luaran	Indikator Capaian
1.	Pengumpulan data primer dan data sekunder yang dibutuhkan	Ketua, anggota, dan asisten peneliti	Data data tentang : 1. Semuan kegiatan ekonomi yang ada di wilayah desa 2. Lembaga pendukung kegiatan ekonomi dan sosial 3. Potensi sumberdaya alam 4. Kondisi sosial masyarakat 5. Organ pemerintah desa	Terkumpulnya semua data yang dibutuhkan untuk merumusan potensi kegiatan ekonomi desa.
2.a.	FGD dengan Pemerintah desa dan perwakilan masyarakat.	Penliti dan asisten peneliti	Tersusunnya data kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat yang dapat dipakai sebagai obyek membangun desa/KKN Tematik	Tersedia pilihan-pilihan kegiaan ekonomi unggulan masyarakat untuk kegiatan membangun desa/ KKN tematik
2.b.	FGD dengan mahasiswa (S1) dan dosen jurusan ilmu ekonomi.	Penliti dan asisten peneliti	1. Terpilihnya dan beberapa kegiaan ekonomi nggulan masyarakat untuk kegiatan membangun desa/ KKN tematik. 2. Penyusunan diskripsi kegiaan ekonomi nggulan masyarakat untuk kegiatan membangun desa/ KKN tematik.	Kegiaan ekonomi nggulan masyarakat untuk kegiatan membangun desa/ KKN tematik sudah ditentukan
3.	Perumusan dan Penyusunan Petunjuk pelaksanaan kegiatan membangun desa/KKN tematik	Penliti dan asisten peneliti	Tersusunnya Buku Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Membangun desa/KKN Tematik.	Buku Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Membangun desa/KKN Tematik sudah dicetak dan siap dipergunakan oleh seluruh <i>steger holder</i> .
4.	Menyusun skema kerjasama pelaksanan kegiatan membangun desa/KKN tematik antara FEB dengan Pemerinta Desa	Ketua penliti, peneliti, dan asisten peneliti	Tersusnya Darft Kerjasama antara FEB dan Pemerintah Desa.	Kerjasama antara FEB dan Pemerintah Desa telah ditandatangani oleh Dekan FEB dan Lurah Desa.
5.	Pelaksanaan pembelajaran diluar	Ketua Jurusan	Pelaksanaan Pembelajaran diluar kampus Melalui Kegiatan	Tercapainya salah stu <i>learning outcome</i>

	kampus Melalui Kegiatan membangun Desa/ KKN tematik.	dan koorprod	membangun Desa/ KKN tematik dilaksanakan sesuai dengan rencana dan berjalan lancar.	Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) program studi Ekonomi Pembangunan.
--	--	--------------	---	--

3.3. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Kegiatan penelitian ini direncanakan dilaksanakan dalam waktu 8 bulan, dimulai pada bulan Maret 2021 dan akan berakhir pada bulan Oktober 2020. Secara lebih rinci jadwal kegiatan penelitian seperti pada Table 2.

Tabel 3.2:
Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Penanggung Jawab	Bulan								
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Persiapan Proposal		■								
2	Pengumpulan data primer dan data sekunder yang dibutuhkan			■	■						
3	FGD-1: FGD dengan Pemerintah desa dan perwakilan masyarakat.				■						
4	FGD-2: FGD dengan mahasiswa (S1) dan dosen jurusan ilmu ekonomi.					■					
5	Perumusan dan Perumusan Petunjuk pelaksanaan kegiatan membangun desa/KKN Tematik					■	■				
6	Menyusun skema kerjasama Pelaksanaan kegiatan membangun desa/KKN tematik antara FEB dengan Desa					■	■				
7	Menyusun naskah untuk beberapa publikasi ilmiah						■	■			
8	Melakukan publikasi melalui seminar dan journal ilmiah.							■	■		
9	Penusunan Laporan Akhir Penelitian								■	■	

BAB IV

HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan metode yang digunakan terhadap kegiatan pembangunan di Desa Wirokerten baik melalui FGD maupun literatur dari RPJM Desa tahun 2019-2025, maka ada tujuh (7) program prioritas desa yang dua diantaranya yang berkaitan dengan ekonomi, yaitu; program penanggulangan kemiskinan dan program ketahanan pangan dan infrastruktur (RPJM Desa 2019-2024).

Program penanggulangan kemiskinan, mewujudkan ekonomi kerakyatan berbasis teknologi informasi dengan menjalin kerjasama pemerintah, swasta dan instansi terkait sehingga system informasi desa dapat berperan dalam memberikan manfaat secara ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan bagi kaum difabel dan berkebutuhan khusus, sehingga warga masyarakat tersebut dapat lebih berdaya dalam berbagai bidang kegiatan yang ada, yang akan mewujudkan Desa Wirokerten yang ramah difabel dan berkebutuhan khusus.

Program ketahanan pangan dan infrastruktur, mewujudkan Desa Wirokerten yang tertata secara fisik dan social kemasyarakatan, membentuk desa wisata sebagai bentuk peningkatan pengetahuan tentang pariwisata dan masyarakat berdaya dengan cara menciptakan suasana yang memungkinkan potensi seni, budaya, pertanian dan olah raga dalam masyarakat dapat berkembang, lapangan pekerjaan bagi warga masyarakat dengan tujuan sebagai penambah pendapatan bagi keluarga sehingga dapat terwujud Desa Wirokerten yang sejahtera.

Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa program Desa Wirokerten yang dapat di gunakan untuk magang mahasiswa program studi ekonomi pembangunan dalam kegiatan MBKM Membangun Desa /KKN Tematik adalah program penanggulangan kemiskinan dan program ketahanan pangan dan infrastruktur (RPJM Desa 2019-2024).

Dari dua program prioritas tersebut, maka dipilihlah sub program desa yang berkaitan dengan program prioritas di atas, yaitu sub program desa yang berkaitan dengan: bidang Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM), dan bidang Perdagangan dan Perindustrian.

Pemilihan program prioritas dan sub program tersebut sesuai dengan arah kebijakan pembangunan desa yang diarahkan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pengembangan perdesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan desa kota. Sebagai daerah pengembangan ekonomi yang

terletak di Kawasan strategis yaitu : Dusun Mutihan dan Grojogan. Sedangkan Kawasan yang dipusatkan sebagai Kawasan pertanian adalah Dusun Botokenceng, Sampangan, Wirokerten, Kepuh Wetan, dan Kepuh Kulon.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menganalisis program dan kegiatan yang ada di RPJM Desa Wirokerten, dan menganalisis potensi yang ada di Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Capaian Luaran

1. Capaian luaran berupa artikel publikasi
2. Capaian luaran berupa Prosiding International Conference LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta
3. Capaian luaran berupa buku panduan kegiatan MBKM Membangun Desa /KKN Tematik,
4. Capaian luaran tambahan berupa skema kerjasama pelaksanaan membangun desa/KKN tematik antara FEB dengan pemerintah desa Wirokerten berupa Draf MOU

BAB V

STATUS LUARAN

5.1. Luaran Wajib

1. Luaran wajib berupa artikel publikasi, ada di lampiran
2. Luaran wajib berupa Buku Panduan Pelaksanaan Kegiatan MBKM Membangun Desa /KKN Tematik.
3. Prosiding International Conference LPPM UPN “Veteran”Yogyakarta

5.2. Luaran Tambahan

1. Luaran tambahan berupa Draf MOU/PKS antara Jurusan Ilmu Ekonomi dengan Desa Wirokerten, ada di Lampiran

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa program Desa Wirokerten yang dapat digunakan untuk magang mahasiswa program studi ekonomi pembangunan dalam kegiatan MBKM Membangun Desa /KKN Tematik adalah program penanggulangan kemiskinan dan program ketahanan pangan dan infrastruktur (RPJM Desa 2019-2024).

Dari dua program prioritas tersebut, maka dipilihlah sub program desa yang berkaitan dengan program prioritas di atas, yaitu sub program desa yang berkaitan dengan: bidang Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM), dan bidang Perdagangan dan Perindustrian.

6.2. Saran

Diharapkan bahwa program kegiatan MBKM Membangun Desa /KKN Tematik ini nantinya tidak hanya sebatas pada program yang berkaitan dengan bidang ekonomi saja, tetapi juga bidang-bidang yang lain, sehingga nantinya program kegiatan MBKM Membangun Desa /KKN Tematik ini bisa membantu desa dalam mengatasi permasalahan-permasalahan pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Junaidi, Aris, dkk (2020) Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Kim, Y. H., Sting, F. J., & Loch, C. H. (2014). Top-down, bottom-up, or both? Toward an integrative perspective on operations strategy formation. *Journal of Operations Management*, 32(7- 8), 462-474.
- Moerad, S. K., Susilowati, E., & Windiani, W. (2016). Pemetaan Potensi dan Dampak Ekonomi Masyarakat di Kawasan Pertambangan Bukit Tumpang Pitu Banyuwangi. *JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH)*, 9(2), 114-138.
- Pouw, N., & Gupta, J. (2017). Inclusive Development: A Multi-disiplinary Approach. *Sustainability Science*, 104–108
- Rafsanzani, H., Bambang S., & Suwondo. (2010). Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa: Studi Kasus di Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. *Jurnal Adminintrasi Publik*, 1 (4).
- Rivera, M., Knickel, K., Rios, I. D. Le, Ashkenazy, A., Pears, D. Q., Chebach, T., & Sumane, S. (2017). Rethinking The Connections Between Agricultural Change and Rural Prosperity: A Discussion of Insights Derived from Case Studies in Seven Countries. *Journal of Rural Studies*, 1–10.
- Suswanto, B., Handoko, W., & Sabiq, A. (2013). Model Community Development Sebagai Strategi Pemberdayaan Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Review Politik*, 03, 298–312.
- Syahza, A. and Suarman (2013). Strategi pengembangan daerah tertinggal dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14 (1), 126–139.

Todaro, M. P. and Smith, S. C. (2012). Economics Development. 11th Edition.
Boston: Pearson Education Inc.

Lampiran 1: Publikasi Artikel Ilmiah

VILLAGE ECONOMIC POTENTIAL FOR THE IMPLEMENTATION OF LEARNING BUILDING VILLAGE / KKN THEMATIC MBKM PROGRAM ECONOMIC STUDY PROGRAM DEVELOPMENT DEPARTMENT OF ECONOMICS, FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS OF THE UPN "VETERAN" YOGYAKARTA

Jamzani Sodik

Purwiyanta

Diah Lufti Wijayanti

Faculty of Economics and Business of the UPN "Veteran" Yogyakarta

ABSTRACT

The background of this research is the preparation of the Independent Learning Curriculum for the Independent Campus (MBKM) of the Development Economics Study Program. One of the mandates of the curriculum is the flexibility of the student learning process to get an off-campus learning experience for one semester (6 months), including through village building activities/thematic Real Work Lectures (KKN thematic) which are equated with the achievement of 21 credits. The purpose of this research is the availability of a thematic Village Development Activity Implementation Guide/KKN as a complement to the curriculum that has been prepared. This guide provides directions, and detailed instructions for managers of study programs and their staff, students of the development economics study program (S1) who choose learning through village building activities/thematic KKN.

The problem of this research is: what are the village economic activities that can be used as objects of activities to build the thematic village / KKN. The method used to answer these problems is: (1) Survey at the location of Wirokerten Village (2) Focus Group Discussion (FGD) with stakeholders (village officials, villagers, and lecturers of the Department of Economics).

The results showed that village programs related to village economic development programs were sub-programs related to: the field of small and medium enterprises (MSMEs), and the fields of trade and industry, which was the choice for student development study programs in the implementation of the MBKM program to build Thematic Village / KKN

I. INTRODUCTION

Merdeka Policy Learning Merdeka Campus, hereinafter abbreviated as MBKM, based on Minister of Education and Culture Regulation Number 3 of 2020 concerning National Standards of Higher Education, especially Article 15 to 18. MBKM aims to encourage students to obtain learning experiences with various additional competencies Study program and / or outside campus (Junaidi, Aris, 2020). This policy aims to realize competitive humans; That is a healthy man, intelligent, adaptive, creative, innovative, skilled, dignified, productive, and character in accordance with the values of Pancasila. Important instruments for implementation are by applying

eight main performance indicators (IKU) which have been determined through the Decree of the Minister of Education and Culture number 754 / P / 2020. Related to this, the Chancellor has provided guidance for implementing MBKM through the Chancellor Regulation Number 13 of 2020 concerning Implementation of MBKM (Merdeka Belajar-Kampus Merdeka) in the National Development University "Veteran" Yogyakarta.

The Economic Study Program for the Department of Economics in 2020 received a MBKM grant from the Ministry of Education and Culture for the implementation of the MBKM curriculum in order to improve graduate competencies. The output of the grant is the flexibility of the learning process of students to get an outdoor study experience for one semester (6 months and equivalent to 21 credits), which is contained in the 2020 curriculum, and applies to students of 2019 and afterwards. In this regard, four forms of learning activities outside the campus, namely; (1) Internship / Work Practice (2) Building the Thematic Village / KKN; (3) Research / Research; (4) Entrepreneurship

Special Activities Building the Village / KKN thematic is intended for the achievement of one of the learning outcomes study programs, "Graduates of the Development Economic Study Program are able to use the basic concepts of economic theory that are controlled to solve economic and development problems". This is in line with the expectations of the Ministry of Education and Culture that the study program is able to prepare students into high school graduates who are true learners who are competent, supple and resilient (Agile Learner), ready to contribute positively in the development of the nation and become a productive citizen of a world.

The involvement of students in the activity of building the village / KKN thematic is also in line with the existence of UPN "Veteran" Yogyakarta as the State Bela University. The learning experience of building villages is expected to foster students' empathy towards the problems of rural economic development and grow the spirit of the country's defense. Therefore, the Department of Economics, Development Economic Study Programs need to conduct a study of the issue of rural economic development issues as part of the preparation for the implementation of the activities to build the thematic village / KKN. The problems submitted in this study are: What are the programs and village economic activities that can be used as objects of building activities to build thematic villages / KKN thematic?

II. LITERATURE REVIEW

The rural development paradigm has undergone significant changes. According to Rivera, et al, (2017) the old paradigm of rural development is very simple and is closely related to the problem of modernizing the agricultural sector and taking direct benefits resulting from the modernization of the agricultural sector. In the end, it was realized that the completion of rural development requires an approach from various aspects. Pouw and Gupta (2017) mention that development must be inclusive, not just one approach but using many approaches. Inclusive development emphasizes development with an approach to many economic aspects and social aspects such as community involvement and political issues.

Todaro and Smith (2012) suggest the importance of the role of development planning as the surest and direct route to economic growth. In the past and also implemented in several countries, development planning was carried out on a top-down basis, in this case the role of the central government in development planning was very dominant. The central government prepares a national economic development program, or roadmap in accordance with national conditions. Indeed, with this system, economic development is more directed and controlled, but many policies are sometimes not in accordance with the conditions and needs of local communities.

Through the Regional Autonomy policy, Indonesia tries to implement bottom-up development planning, in accordance with the conditions and needs of each region. Through autonomy, it is hoped that the aspirations of the regional community can be absorbed by the central government and its implementation is in line with the potential of the resources owned by the region, because the people in the region are very aware of all their potential (Kim et al. 2014).

Actually, not only the development paradigm has changed, from top down to bottom up, but current development has also emphasized community involvement and included aspects of community empowerment as part of the development process, often referred to as people centered development, local resource-based development. resources based development), as well as development by including institutional aspects (Suswanto, et al. 2013).

In terms of rural development, the village government is an extension of the central government that can have a strategic role in implementing development management so that the achievement of accelerating the success of national development (Rafsanzani, et al. 2010). Syahza and Suarman (2013), state that rural development must be carried out with an approach that is in accordance with its nature, character and characteristics.

Socio-cultural and socio-economic conditions need to be identified in determining rural development priorities and incorporated into integrated planning. Some of the socio-cultural conditions include; (1) the dominant values held by the community that are able to become the driving force of the community; (2) what kind of social forces are able to encourage change so that society can change from within; (3) the character of the community in responding to social intervention; (4) patterns of information and communication that occur in the community, both regarding the dissemination of information and within the framework of learning; (5) community learning media; and (6) what environmental factors influence people's attitudes and behavior (Muerad et al. 2016).

The development of the rural economic base has long been carried out through various programs, but these efforts have not been fully successful. One of the most highlighted factors is the magnitude of government intervention which sometimes hinders the creativity and innovation of the community. Another thing that perhaps needs to be considered is that the economic institutional systems and mechanisms in rural areas have not been running effectively and tend to depend on government assistance, and the level of independence is still low.

To accelerate rural economic development, the Indonesian government through Law no. 6 of 2014 concerning Villages has given the village authority in regulating and managing government affairs, the interests of the local community based on community initiatives, origin rights, and/or recognized traditional rights. This is the first step of village independence in the administration of government and in the management of village funds. Besides being given the authority, starting in 2015 the village government was given an allocation of funds sourced from the APBN. Through the allocation of village funds, it is hoped that the village can play a more active role in governance, implementation of development, community development, and community empowerment.

Universities can take part in the development of rural communities as stated in the Triple Helix idea, which is nothing but a synergy between universities, village governments, and the business world. In this case, universities contribute their resources, namely science and technology owned by their academics.

In the Guidebook for the Preparation of the Higher Education Curriculum (Dirjendikti, 2020) it is stated that to increase the link and match between higher education graduates and the business and industrial world as well as a future that is rapidly changing, the Ministry of Education

and Culture enacts new policies in the field of higher education through program "Freedom of Learning – Independent Campus (MBKM)". The MBKM policy provides opportunities for students to gain wider learning experiences and new competencies through several learning activities outside their study program, with the hope that in the future they will be able to produce graduates who are ready to win the increasingly complex challenges of life in the 21st century.

III. RESEARCH METHODOLOGY

3.1. The scope of research

The scope of this research is limited to Wirokerten Village, Banguntapan District, Bantul Regency. This village was chosen with the consideration that the Head of the Department of Economics has conducted an initial assessment in order to obtain the 2020 MBKM curriculum grant. Another reason is that UPN "Veterans" Yogyakarta already has an MOU with the Bantul Regency Government.

3.2. Data Types and Sources

In this study, qualitative and quantitative approaches were used to answer the problems posed in this study. For the purposes of analysis, primary data and secondary data are needed. The data used in this study are data related to the economic and social conditions of the village community, the data are:

1. All economic activities in the village area
2. Institutions supporting economic and social activities
3. Natural resource potential
4. Social conditions of the community
5. Village government organs

Primary data were obtained by on-site surveys and direct interviews with stakeholders, while secondary data were sourced from village government documentation, district BPS, and other supporting literature. The selection of village economic activities that are used as the object of village development activities/thematic KKN is carried out through focus group discussions (FGD) with stakeholders. In summary, the steps taken in this research are:

1. Collecting the required data
2. Conduct an analysis of economic activities that can be developed through:
 - a. Focus group discussion (FGD) with village government and community representatives.

- b. Focus group discussion (FGD) with lecturers and undergraduate students (S1) majoring in Economics.
3. Formulate the design and prepare the Implementation Guidelines for the Thematic Village Building/KKN Activities (21 credits)
4. Develop a cooperation scheme for implementing thematic village development/KKN between FEB and the village government.
5. Implementation of village building activities/thematic KKN

IV. FINDING AND DISCUSSION

Based on the results of the implementation of the methods used for development activities in Wirokerten Village both through FGDs and literature from the 2019-2025 Village RPJM, there are seven (7) village priority programs, two of which are related to the economy, namely; poverty reduction program and food and infrastructure security program (RPJM Desa 2019-2024).

Poverty reduction program, realizing a populist economy based on information technology by collaborating with the government, private sector and related agencies so that village information systems can play a role in providing economic benefits and realizing welfare for people with disabilities and special needs, so that community members can be more empowered in various fields. existing activities, which will create a friendly Wirokerten Village and special needs.

Food security and infrastructure programs, realizing a physically and socially organized Wirokerten Village, forming a tourist village as a form of increasing knowledge about tourism and empowering communities by creating an atmosphere that allows the potential for arts, culture, agriculture and sports in the community to develop, employment opportunities for community members with the aim of increasing income for the family so that a prosperous Wirokerten Village can be realized.

V. CONCLUSION AND FURTHER RESEARCH

Based on the results of the analysis, it was found that the Wirokerten Village program that can be used for student internships in the development economics study program in the MBKM Building Village/Thematic KKN activities are poverty reduction programs and food and infrastructure security programs (RPJM Desa 2019-2024).

From the two priority programs, the village sub-programs related to the above priority programs were selected, namely the village sub-programs related to: the field of Small, Micro and Medium Enterprises Cooperatives (MSMEs), and the field of Trade and Industry.

The selection of priority programs and sub-programs is in accordance with the direction of village development policies which are directed at the development of growth centers to encourage sustainable rural development that has social, economic, and ecological resilience and encourages rural-urban linkages. As an economic development area, it is located in a strategic area, namely: Dusun Mutihan and Grojogan. While the areas that are concentrated as agricultural areas are the hamlets of Botokenceng, Sampangan, Wirokerten, Kepuh Wetan, and Kepuh Kulon.

Future research is expected to be able to analyze the existing programs and activities in the RPJM of Wirokerten Village, and analyze the potential that exists in Wirokerten Village, Banguntapan District, Bantul Regency, Special Region of Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Junaidi, Aris, dkk (2020) Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Kim, Y. H., Sting, F. J., & Loch, C. H. (2014). Top-down, bottom-up, or both? Toward an integrative perspective on operations strategy formation. *Journal of Operations Management*, 32(7- 8), 462-474.
- Moerad, S. K., Susilowati, E., & Windiani, W. (2016). Pemetaan Potensi dan Dampak Ekonomi Masyarakat di Kawasan Pertambangan Bukit Tumpang Pitu Banyuwangi. *JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH)*, 9(2), 114-138.
- Pouw, N., & Gupta, J. (2017). Inclusive Development: A Multi-disiplinary Approach. *Sustainability Science*, 104–108
- Rafsanzani, H., Bambang S., & Suwondo. (2010). Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa: Studi Kasus di Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. *Jurnal Adminintrasi Publik*, 1 (4).
- Rivera, M., Knickel, K., Rios, I. D. Le, Ashkenazy, A., Pears, D. Q., Chebach, T., & Sumane, S. (2017). Rethinking The Connections Between Agricultural Change and Rural Prosperity: A Discussion of Insights Derived from Case Studies in Seven Countries. *Journal of Rural Studies*, 1–10.
- Suswanto, B., Handoko, W., & Sabiq, A. (2013). Model Community Development Sebagai Strategi Pemberdayaan Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Review Politik*, 03, 298–312.
- Syahza, A. and Suarman (2013). Strategi pengembangan daerah tertinggal dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14 (1), 126–139.

Todaro, M. P. and Smith, S. C. (2012). Economics Development. 11th Edition.
Boston: Pearson Education Inc.

Lampiran 2: Draft MOU

PERJANJIAN KERJASAMA

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UPN VETERAN YOGYAKARTA
DENGAN
DESA WIROKERTEN, KEC. BANGUNTAAN, KAB BANTUL
NOMOR: B/164/UN62.14.3.1/TU/XI/2020

TENTANG
MEMBANGUN DESA (KKN TEMATIK)

Pada hari initanggal bulantahun Dua ribu dua puluhdi Bantul, Derah Istimewa Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Hj. Rahma Wijyaningrum, SE** : Kepala Desa Wirokerten, berkedudukan di Kantor Pelayanan Terpadu, Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. **Dr. Jamzani Sodik, M.Si** : Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi, FEB UPN “Veteran” Yogyakarta, berkedudukan di Kampus UPN “Veteran” Yogyakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK atau secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK dalam kedudukannya terlebih dahulu menerangkan bahwa telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama antara Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta dengan, Kepala Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul tentang Membangun Desa (KKN Tematik), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.

Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini disamping untuk Membangun Desa (KKN Tematik)

mahasiswa, juga sebagai sarana bagi mahasiswa untuk meningkatkan nilai tambah ketrampilan dan wawasan pengetahuan mahasiswa dalam menerapkan ilmunya di desa.

BAB II

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah Membangun Desa (KKN Tematik), di Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul dengan memanfaatkan sumber daya dan kapasitas institusi yang dimiliki PARA PIHAK.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah Membangun Desa (KKN Tematik) dalam rangka meningkatkan nilai tambah ketrampilan dan wawasan pengetahuan mahasiswa.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) PARA PIHAK sepakat mengadakan kerjasama dalam rangka Membangun Desa (KKN Tematik) yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi.
- (2) PIHAK KESATU menerima hasil Membangun Desa (KKN Tematik) dari PIHAK KEDUA.
- (3) PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini minimal 4 (empat) kali selama Perjanjian Kerjasama ini berlangsung.

BAB IV

BIAYA

Pasal 4

- (1) Segala biaya dan operasional Membangun Desa (KKN Tematik) menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA
- (2) Segala biaya perencanaan, yang berkaitan dengan Membangun Desa (KKN Tematik), menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak :
 - a. menerima mahasiswa Membangun Desa (KKN Tematik) dari PIHAK KEDUA;
 - b. memperkerjakan mahasiswa Membangun Desa (KKN Tematik) yang berasal dari PIHAK KEDUA;
 - c. memberikan ketrampilan dan pengetahuan kepada mahasiswa dari PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak :
 - a. merencanakan dan menentukan Membangun Desa (KKN Tematik)
 - b. menerima laporan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan.
 - c. menilai dan mengevaluasi hasil laporan dari PIHAK KEDUA ;

Pasal 6

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban :
 - a. menyiapkan kegiatan dan pekerjaan dalam rangkaian kegiatan Membangun Desa (KKN Tematik);
 - b. memberi laporan hasil Membangun Desa (KKN Tematik) kepada PIHAK KEDUA setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan;
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
 - a. mensosialisasikan Membangun Desa (KKN Tematik) kepada mahasiswa;
 - b. merencanakan Job Desk Membangun Desa (KKN Tematik);
 - c. memberikan hasil Membangun Desa (KKN Tematik)
 - d. melaksanakan pembimbingan kepada mahasiswa;

BAB VI

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan secara tertulis oleh PIHAK yang akan memperpanjang dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 8

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. adanya peperangan;
 - b. adanya pemberontakan di wilayah Republik Indonesia;
 - c. adanya keributan, kekacauan dan huru-hara;
 - d. adanya bencana alam.
- (3) Dengan terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) maka kelanjutan Perjanjian Kerjasama ini diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.
- (4) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh pejabat yang berwenang.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) PARA PIHAK sepakat segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat tercapai, maka PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

BAB IX

PENGAKHIRAN KERJASAMA

Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau tidak diperpanjang, maka segala hak dan kewajiban PARA PIHAK yang masih ada setelah berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini wajib diselesaikan oleh masing-masing PIHAK.
- (3) Dalam hal pembatalan Perjanjian Kerjasama ini PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mensyaratkan Keputusan Hakim untuk pembatalan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB X

ADDENDUM

Pasal 11

Segala perubahan berupa penambahan maupun pengurangan serta hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam naskah Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XI

LAIN-LAIN

Pasal 12

Semua hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerjasama ini berikut perubahan dan pembaharuannya yang timbul di kemudian hari, tidak akan berakhir karena berakhirnya masa jabatannya salah satu PIHAK.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 13

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,
Jurusan Ilmu Ekonomi
Ketua,

PIHAK KESATU,
Kepala Desa Wirokerten
Kec. Banguntapan, Kab. Bantul

Dr. Jamzani Sodik, M.Si

Hj. Rahma Wijyaningrum, SE

